



21 Hektare Masih Kumuh

YOGYA, TRIBUN - Sedikitnya seluas 21 hektare wilayah Kota Yogyakarta masih tergolong kumuh. Wilayah kumuh tersebut, tersebar di 13 Kecamatan dan 9 Kelurahan.

Penggolongan kawasan kumuh tersebut berdasarkan tujuh indikator dan 19 kriteria, di antaranya termasuk bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, dan pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta proteksi kebakaran.

"Target kita di 2019 ini bisa nol hektare ya, tapi bukan nol kriteria. Memang masih ada indikator yang belum selesai nanti dari wilayah itu, karena penilaiannya kalau dibawah 18 skornya itu sudah termasuk tidak kumuh," kata Mahmud Alhari, Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Yogyakarta, Rabu (9/10).

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Jogja No.216/2016, luas kawasan kumuh di Kota Jogja mencapai 264,9 hektare. Pada 2018 kawasan kumuh tersisa di angka 50,3 hektare.

Mahmud mengatakan, ditargetkan pada 2022 mendatang ketujuh indikator dan 19 kriteria dari kawasan kumuh itu bisa tuntas.

Namun begitu, persoalan yang muncul berikutnya adalah kawasan yang sebelumnya belum tergolong ke dalam kawasan kumuh, bisa jadi dimungkinkan akan muncul kembali.

"Tapi karena penanganannya beragam dan ada stakeholder lainnya

seperti misalnya provinsi yang menangani Kecamatan Ngampilan, jadi kita sangat optimis nol hektare itu bisa dicapai," imbuhnya.

Ditambahkannya, persoalan air dan sanitasi masih akan menjadi fokus pekerjaan selain jalan dan drainase. Pihaknya juga membentuk tim yang melakukan pemeliharaan dan pengawasan yakni kelompok pemanfaatan dan pemelihara guna mengatasi kerusakan dan potensi munculnya kembali kawasan kumuh.

Mahmud juga menjelaskan, bahwa proses pemeliharaan dari pembangunan kawasan kumuh dilakukan dengan mencakup dua tahapan.

Pertama diserahkan kepada masyarakat untuk merawat dan melakukan kerja bakti untuk memperbaiki kerusakan kecil.

Kedua, kelompok pemanfaat dan pemelihara juga bisa melakukan koordinasi dengan dinas serta instansi terkait untuk menangani persoalan yang lebih kompleks.

"Yang cukup sulit dari indikator itu untuk dilakukan perbaikan masih di bangunan gedung, karena berkaitan dengan pemugaran dan peremajaan. Di sisi lain kalau penataannya di pinggir sungai kan tentu kita terkendala di lokasi pemindahan," urainya.

Berdasar catatan Bappeda Kota Yogyakarta, penataan kawasan kumuh akan diklasifikasikan menjadi empat bagian. Pertama wilayah Wiongo dengan konsep water front

area, Gajahwong dengan integrated eco tourism, kawasan Code dengan riverside pedestrian, serta kawasan non barantan lewat mix use.

Ketersediaan air

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko mengatakan, ketersediaan air bersih menjadi catatan utama untuk segera diselesaikan dari tujuh indikator yang ditetapkan dari kota bebas kumuh.

Menurut dia, masih banyak warga masyarakat yang hanya memanfaatkan sumur-sumur dangkal untuk kebutuhan air sementara lokasinya juga berdekatan dengan septic tank. Hal itu ditakutkan dapat menyebabkan paparan bakteri escherichia coli akibat sanitasi yang kurang baik.

"PDAM sebagai penyedia air minum kan perlu menanggapi ini. Kemarin memang sudah ada suntikan anggaran dari Pemkot, tapi masih ada juga persoalan karena saat ini pipa yang dipakai itu sudah peninggalan Belanda," ujarnya.

Selain itu, ketersediaan alat pemadam kebakaran di setiap kampung juga penting mengingat kepadatan penduduk dan rumah yang cukup terpusat di wilayah Jogja. Danang menyebut, jalur masuk ke wilayah tersebut masih terkendala dari sempitnya ruas jalan, sehingga ketersediaan alat pemadam kebakaran menjadi tindakan preventif untuk mengantisipasi api meluas sewaktu kebakaran melanda. (jsf)

Rusuh Segera Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005